

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL-FISKAL PADA PT. SUMBER ALAM UTAMA KALBAR (SAUK)

Dimaz Ichsan Wicaksono, Yuniarwati

Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: yuniarwati@fe.untar.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana PT Sumber Alam Utama Kalbar melakukan rekonsiliasi dari laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal. Objek dalam penelitian ini adalah PT Sumber Alam Utama Kalbar yang berlokasi di Ketapang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan fakta serta bukti objek yang diteliti, yang dimana bukti tersebut dianalisa untuk dijawab berbagai masalah dalam penelitian. Hasil ini memberikan fakta bahwa prosedur perpajakan yang dilakukan oleh PT Sumber Alam Utama Kalbar belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008, karena terdapat biaya pribadi yang belum dicatat dan dilaporkan dalam laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan.

Kata kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal

Abstract

The purpose of this study is to analyze how PT. Sumber Alam Utama Kalbar performs reconciliation from commercial financial statements to fiscal financial statements. The object of this research is PT Sumber Alam Utama Kalbar which is located in Ketapang. This study uses a qualitative descriptive analysis method, namely research that collects facts and evidence of the object under study, where the evidence is analyzed to answer various problems in the research. These results provide the fact that the tax procedures carried out by PT Sumber Alam Utama Kalbar are not fully in accordance with the tax regulation of the Income Tax Law No.36 of 2008, because there are personal expenses that have not been recorded and reported in the company's fiscal reconciliation report.

Keywords: *Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Statements, Fiscal Financial Statements*

How to cite:	Dimaz Ichsan Wicaksono, Yuniarwati (2023), Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial-Fiskal Pada Pt. Sumber Alam Utama Kalbar (Sauk), Vol. 7, No. 12, Desember 2022, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11286
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Pendahuluan

Pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia (Maulana, 2021) (Iskandar, 2009). Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Nugraha, Oktavia, & Chandra, 2018). Pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia (Maiwan, 2017). Tidak hanya berfokus di Jawa, pembangunan infrastruktur juga dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Hadiyat, 2014). Total pembangunan jalan tol pada masa pemerintahan Jokowi telah tercatat mencapai 1.852 km. sedangkan untuk pembangunan jembatan selama periode 2015 hingga 2018 mencapai 41.063 meter (Oktasari, 2020). Berdasarkan laporan Global Competitiveness Index 2018 (Indriyanti, 2018), terkait penilaian indeks daya saing infrastruktur, World Economic Forum (WEF) mencatat Indonesia menempati ranking ke-71 dari 140 negara (Negara, n.d.).

Menurut Sumber Badan Pusat Statistik (Indonesia, 2021), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki penduduk kurang lebih sebanyak 272,6 juta jiwa pada tahun 2021. Anggaran belanja negara mencapai Rp2.750 triliun pada tahun 2021 yang mana digunakan sebagai pembangunan nasional yang dilakukan secara berkelanjutan dan pemasukan negara Indonesia pada tahun 2021 pendapatan negara sebesar Rp2.003,1 triliun, sedangkan untuk penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp1.277,5 triliun (Pratama & Hartono, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hamper seluruhnya pemasukan negara Indonesia berasal dari pajak belanja pemerintah untuk pembiayaan atas suatu pembangunan infrastruktur yang berasal dari anggaran negara konvensional maupun non konvensional (Puspitasari, 2022).

(Putri & Putri, 2020) Anggaran konvensional adalah sumber pembiayaan yang berasal dari Kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta atau masyarakat berupa hutang, penanaman modal dan investasi (Puspitasari, 2022). Sumber utama APBN adalah pajak, Adapun pajak-pajak tersebut antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (Ocza Kurniawan, 2018).

Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bentuk penelitian yang mengumpulkan fakta serta bukti objek yang diteliti (Rukajat, 2018). Fakta dan bukti tersebut selanjutnya akan dianalisa untuk menjawab berbagai masalah dalam penelitian (Melly, 2023). Berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak didapatkan dari prosedur statistik, tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan yang sebelumnya pernah ada dan belum diketahui (Nugrahani & Hum, 2014).

Penelitian ini menggunakan objek Penelitian yaitu PT. SAUK yang bergerak dibidang Pengolahan minyak bumi dengan NPWP: 01.858.xxx.xxxx.000. PT. SAUK memiliki kantor perwakilan yang terletak di Jl. Rawa Maja No. 39, Cipete Selatan, Jakarta

Selatan dan kantor operasional terletak di Jl. Brigjend Katamso Kab. Ktapang Kalimantan Barat.

Hasil dan Pembahasan

Dibawah ini adalah hasil penelitian untuk melihat bagaimana perusahaan dan peneliti dalam membuat laporan rekonsiliasi fiskal PT Sumber Alam Utama Kalbar. Perusahaan memisahkan biaya-biaya yang seharusnya di koreksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan koreksi versi perusahaan dan peneliti:

Tabel 1

**Laporan Laba Rugi Komersial Menjadi Laporan Laba Rugi Fiskal
(Menurut Perusahaan)**

PT. SUMBER ALAM UTAMA KALBAR
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

AKUN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN	13.612.571.656			13.612.571.656

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial-Fiskal Pada PT. Sumber Alam Utama
Kalbar (Sauk)

PT. SUMBER ALAM UTAMA KALBAR
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

AKUN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		Positif	Negatif	
BEBAN POKOK PENJUALAN				
Gaji Karyawan dan Lembur	1.894.630.000			1.894.630.000
Operasional Office Jobber	143.200.000			143.200.000
Operasional Fasilitas Jobber	19.944.000			19.944.000
Monitoring	30.995.000			30.995.000
Perjalanan Dinas	92.142.500			92.142.500
Listrik, Telepon, dan Internet Jobber	166.538.824	83.269.412		83.269.412
Perbaikan SARFAS	1.922.142.146			1.922.142.146
Pengadaan Sparepart	1.228.804.046			1.228.804.046
Biaya Sewa	720.000.000			720.000.000
Lainnya	183.575.300	183.575.300		-
Jumlah Beban Pokok Penjualan	<u>6.401.971.816</u>			<u>6.135.127.104</u>
LABA KOTOR	<u>7.210.599.840</u>			<u>7.477.444.552</u>
BEBAN USAHA				
Gaji	875.050.000			875.050.000
Biaya Operasional Jakarta	25.024.270			25.024.270
Biaya Pemeliharaan	34.384.000			34.384.000
Alat Tulis Kantor	67.515.100			67.515.100
Rumah Tangga Kantor	92.373.222			92.373.222
Pengobatan	67.902.600			67.902.600
Retribusi	1.050.000			1.050.000
Asuransi	307.564.166			307.564.166
Transportasi	70.764.519			70.764.519
Pajak Kendaraan	3.014.700			3.014.700
PBB dan BPHTB	10.002.000			10.002.000
PPh 21	94.082.057	94.082.057		-
Perizinan dan lainnya	435.501.000			435.501.000
Penyusutan	1.084.400.911			1.084.400.911
Entertain	10.711.600	10.711.600		-
Sumbangan	317.463.000	317.463.000		-
Perlengkapan	1.828.600			1.828.600
Pajak Sewa Tanah	144.000.000			144.000.000
PPh Badan	4.214.683			4.214.683
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	<u>3.646.846.428</u>			<u>3.224.589.771</u>
LABA (RUGI) USAHA	<u>3.563.753.412</u>			<u>4.252.854.781</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
PENDAPATAN LAIN-LAIN				
Pendapatan Jasa Giro	31.852.853		31.852.853	-
Pendapatan Lain-lain	43.105.800			43.105.800
Jumlah	<u>74.958.653</u>			<u>-</u>
BEBAN LAIN-LAIN				
Administrasi Bank	12.237.747			12.237.747
Pajak Bunga	6.370.571			6.370.571
Biaya Lain-lain	9.150.148			9.150.148
Jumlah	<u>27.758.466</u>			<u>27.758.466</u>
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	<u>47.200.187</u>			<u>(27.758.466)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	<u>3.610.953.599</u>			<u>4.225.096.315</u>
PAJAK TERHUTANG	<u>773.450.831</u>			<u>773.450.831</u>
LABA SETELAH PAJAK TERHUTANG	<u>2.837.502.769</u>	<u>689.101.369</u>	<u>31.852.853</u>	<u>3.451.645.485</u>

Tabel 2
Laporan Laba Rugi Komersial Menjadi Laporan Laba Rugi Fiskal
(Menurut Peneliti)

PT. SUMBER ALAM UTAMA KALBAR
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

AKUN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN	13.612.571.656			13.612.571.656
BEBAN POKOK PENJUALAN				
Gaji Karyawan dan Lembur	1.894.630.000			1.894.630.000
Operasional Office Jobber	143.200.000			143.200.000
Operasional Fasilitas Jobber	19.944.000			19.944.000
Monitoring	30.995.000			30.995.000
Perjalanan Dinas	92.142.500			92.142.500
Listrik, Telepon, dan Internet Jobber	166.538.824	83.269.412		83.269.412
Perbaikan SARFAS	1.922.142.146			1.922.142.146
Pengadaan Sparepart	1.228.804.046			1.228.804.046
Biaya Sewa	720.000.000			720.000.000
Lainnya	183.575.300	183.575.300		-
Jumlah Beban Pokok Penjualan	<u>6.401.971.816</u>			<u>6.135.127.104</u>
LABA KOTOR	<u>7.210.599.840</u>			<u>7.477.444.552</u>
BEBAN USAHA				
Gaji	875.050.000			875.050.000
Biaya Operasional Jakarta	25.024.270			25.024.270
Biaya Pemeliharaan	34.384.000	7.500.000		26.884.000
Alat Tulis Kantor	67.515.100			67.515.100
Rumah Tangga Kantor	92.373.222	30.000.000		62.373.222
Pengobatan	67.902.600	21.500.000		46.402.600
Retribusi	1.050.000			1.050.000
Asuransi	307.564.166			307.564.166
Transportasi	70.764.519	4.500.000		66.264.519
Pajak Kendaraan	3.014.700	3.014.700		-
PBB dan BPHTB	10.002.000	10.002.000		-
PPh 21	94.082.057	94.082.057		-
Perizinan dan lainnya	435.501.000			435.501.000
Penyusutan	1.084.400.911			1.084.400.911
Entertain	10.711.600	10.711.600		-
Sumbangan	317.463.000	317.463.000		-
Perlengkapan	1.828.600			1.828.600
Pajak Sewa Tanah	144.000.000			144.000.000
PPh Badan	4.214.683			4.214.683
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	<u>3.646.846.428</u>			<u>3.148.073.071</u>
LABA (RUGI) USAHA	<u>3.563.753.412</u>			<u>4.329.371.481</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
PENDAPATAN LAIN-LAIN				
Pendapatan Jasa Giro	31.852.853		31.852.853	-
Pendapatan Lain-lain	43.105.800			43.105.800
Jumlah	<u>74.958.653</u>			<u>43.105.800</u>

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial-Fiskal Pada PT. Sumber Alam Utama
Kalbar (Sauk)

PT. SUMBER ALAM UTAMA KALBAR
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

AKUN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		Positif	Negatif	
BEBAN LAIN-LAIN				
Administrasi Bank	12.237.747			12.237.747
Pajak Bunga	6.370.571			6.370.571
Biaya Lain-lain	9.150.148			9.150.148
Jumlah	27.758.466			27.758.466
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	47.200.187			15.347.334
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	3.610.953.599			4.344.718.815
PAJAK TERHUTANG	787.316.600			787.316.600
LABA SETELAH PAJAK TERHUTANG	2.823.636.999	765.618.069	31.852.853	3.557.402.216

Perhitungan PPh Pasal 29 Menurut Perusahaan dan Menurut Peneliti:

Tabel 3
Perbedaan Perhitungan PPh Badan Perusahaan

	PERUSAHAAN	PENELITI	SELISIH
Peredaran Usaha	13.612.571.656	13.612.571.656	-
Laba Komersial	3.610.953.599	3.610.953.599	-
Koreksi Fiskal			
- Koreksi Fiskal Positif	689.101.369	765.618.069	76.516.700
- Koreksi Fiskal Negatif	(31.852.853)	(31.852.853)	-
PKP			
- PKP (Fasilitas)	1.505.033.044	1.532.013.997	26.980.953
- PKP (Tidak Fasilitas)	2.763.169.071	2.812.704.818	49.535.747
Penghasilan Kena Pajak	4.268.169.071	4.344.718.815	76.549.744
Pajak Terutang	773.450.831	787.316.600	13.865.769
Kredit Pajak			
- PPh Pasal 23	296.950.242	296.950.242	-
- PPh Pasal 25	142.995.000	142.995.000	-
Pajak YMH Dibayar PPh 29	333.505.589	347.371.358	13.865.769

Kesimpulan

Berdasarkan Analisa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT Sumber Alam Utama Kalbar dalam melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal selama tahun 2021. Berdasarkan penelitian yang dilakukan,

PT Sumber Alam Utama Kalbar sudah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal.

Perusahaan dalam membuat SPT tahunan badan mengumpulkan dan memisahkan bukti-bukti terkait biaya-biaya yang dikeluarkan selama setahun beroperasi. Setelah mengumpulkan dan memisahkan bukti-bukti tersebut, perusahaan menyesuaikan biaya-biaya yang dibedakan sesuai dengan peraturan pemerintah dengan membedakan mana biaya beda tetap dan beda waktu. Setelah membedakan pengakuan biaya tersebut maka perusahaan mengkoreksi biaya tersebut.

Peneliti sudah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal di PT Eska Dekade Elgama. Peneliti dalam membuat SPT tahunan badan, peneliti mengumpulkan dan memisahkan bukti-bukti terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama setahun beroperasi. Setelah mengumpulkan dan memisahkan bukti-bukti tersebut, peneliti menyesuaikan biaya-biaya tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah dengan membedakan mana biaya beda tetap dan beda waktu. Setelah membedakan pengakuan biaya, maka peneliti mengkoreksi biaya tersebut. Peneliti memastikan ulang dengan mengkonfirmasi terkait biaya yang tidak ada bukti pendukung tersebut terdapat beberapa akun biaya yang tidak ada bukti pendukung. Peneliti memastikan bahwa biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang tidak ada kaitannya dengan operasional kantor maka peneliti mengkoreksi biaya-biaya tersebut.

Diantara laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh akunting perusahaan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh peneliti maka peneliti menyatakan bahwa terdapat beberapa akun biaya yang seharusnya dikoreksi tetapi oleh akunting tidak di koreksi. Biaya tersebut antara lain rumah tangga kantor, menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf I Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya tidak dapat menjadi pengurang pendapatan bruto. Maka dari itu biaya Rumah Tangga Kantor harus dikoreksi positif sebesar Rp30.000.000,-.

Lalu untuk biaya pengobatan menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf I Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya tidak dapat menjadi pengurang pendapatan bruto. Maka dari itu biaya pengobatan harus dikoreksi positif sebesar Rp21.500.000,-. Menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf I Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya tidak dapat menjadi pengurang pendapatan bruto. Maka dari itu biaya transportasi harus dikoreksi positif sebesar Rp4.500.000,-.

Sementara itu untuk pajak kendaraan menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf I Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya tidak dapat menjadi pengurang pendapatan bruto. Maka dari itu biaya pajak kendaraan harus dikoreksi positif sebesar Rp3.014.700,-. Menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf I Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya untuk kepentingan pribadi, yang seharusnya tidak dapat menjadi pengurang pendapatan bruto. Maka dari itu biaya PBB dan BPHTB harus dikoreksi positif sebesar Rp10.002.000,-.

BIBLIOGRAFI

- Hadiyat, Yayat Dendy. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Pekommas*, 17(2), 81–90.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. (2021). Berita resmi statistik. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II*, 60(08).
- Indriyanti, Aris. (2018). Peningkatan Mutu Dalam Manajemen Sdm Untuk Daya Saing Perguruan Tinggi Di Era Globalisasi. *Prima Ekonomika*, 8(1).
- Iskandar, Heri. (2009). *Analisis yuridis sukuk (surat berharga syariah negara) sebagai alternatif investasi dan pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)*.
- Maiwan, Mohammad. (2017). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(1), 94–115.
- Maulana, Mochamad Rifki. (2021). Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Melly, Inayah. (2023). *VARIASI BAHASA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGUASAAN KOSAKATA DAN HASIL BELAJAR DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MENENDANG*. IKIP PGRI PONTIANAK.
- Negara, Lembaga Administrasi. (n.d.). *SANKRI 2025*.
- Nugraha, Kevin Genjar Sandy, Oktavia, Irene, & Chandra, Yulian Ade. (2018). *PRO KONTRA HUTANG DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA*. *UNEJ E-Proceeding*.
- Nugrahani, Farida, & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3–4.
- OCZA KURNIAWAN, DHIMAS. (2018). *PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR PERTAMBAHAN NILAI IMPOR PERTAMBAHAN NILAI IMPOR*. IIB DARMAJAYA.
- Oktasari, Velia. (2020). *Strategi Wonderful Indonesia Era Joko Widodo Periode 2014-2019 Melalui Pendekatan Competitive Identity*.
- Pratama, Nikolaus, & Hartono, Sony. (2022). Tinjauan Prosedur Operasional Media Sosial Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Edukasi Perpajakan. *JURNAL PAJAK*

INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6(2S), 472–487.

Puspitasari, Dini. (2022). Analisis sumber pendapatan negara dan alokasi belanjanya dalam konteks keuangan publik islam era kekinian di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2).

Putri, Nanda Cahyani, & Putri, Loveani Yastika. (2020). Analisis pembiayaan non-anggaran pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Infrastruktur*, 6(2), 91–103.

Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.

Copyright holder:

Dimaz Ichsan Wicaksono, Yuniarwati (2022)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

